

## KATA PENGANTAR

Tak terasa waktu demikian cepat berlalu. Mendekati berakhirnya program, UN-REDD Programme Indonesia semakin giat bekerja demi kesuksesan REDD+ (*reducing emissions from deforestation and forest degradation plus* atau penurunan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan plus) di Indonesia. Berbagai aktivitas pembangunan kapasitas, konsolidasi, dan konsultasi dilakukan untuk memastikan kesinambungan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Titik berat kegiatan dan aktivitas UN-REDD Programme Indonesia selama empat bulan terakhir adalah memastikan kesiapan, kemandirian, dan kerja sama erat semua pemangku kepentingan multipihak. Satuan Tugas (Satgas) REDD+ ikut terlibat sesuai komitmennya untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai mitra dalam melaksanakan REDD+ di Indonesia. Satgas REDD+ Working Group Strategi Nasional juga mewujudkan komitmennya dengan melakukan konsolidasi dan sinkronisasi dengan pihak UN-REDD Programme Indonesia, baik di Jakarta maupun Sulawesi Tengah —khususnya dengan Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah.

Unsur lain yang juga penting untuk dikuasai oleh para pelaku REDD+ adalah berbagai metodologi terkait tingkat emisi referensi (*reference emissions level* atau REL) dan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (*measurement, reporting and verification* atau MRV) dari *multiple benefit* dari REDD+. Karena pentingnya akurasi data dan kelengkapan cakupan area untuk REL dan MRV, UN-REDD Programme Indonesia melakukan lokakarya untuk penghitungan REL serta lokakarya *allometric equation* untuk menghitung ulang nilai emisi dan serapan karbon gas rumah kaca secara tahunan.

Dengan diadakannya kegiatan-kegiatan tersebut, UN-REDD Programme Indonesia berharap dapat menyelesaikan program dengan meninggalkan perangkat yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Selamat membaca dan semoga dapat bermanfaat!

**Yuyu Rahayu**

Direktur Inventarisasi Pemantauan dan Sumber Daya Hutan selaku National Project Director UN-REDD Programme Indonesia

## Evaluasi Rintisan FPIC di Sulawesi Tengah

Menindaklanjuti kegiatan uji coba FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*) atau Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) di Sulawesi Tengah pada April 2012, evaluasi dilakukan pada 25 Juli 2012 di Bogor.

Kegiatan-kegiatan terkait FPIC yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah sudah sampai pada rintisan pelaksanaan di tingkat masyarakat, yakni di Desa Lembah Mukti, Kecamatan Dampelas-Sojol, Kabupaten Donggala.

Pada kegiatan tersebut, metodologi yang tertuang dalam Panduan FPIC dipraktikkan baik tahapan maupun tata

caranya. Untuk mengkaji dan mengambil hikmah pembelajaran keseluruhan uji coba FPIC, dilakukan evaluasi yang melihat (1) Persiapan; (2) Pelaksanaan; dan (3) Hasil uji coba.

Tim evaluasi terdiri dari Didik Suharjito, Haryanto Putro, dan Emilianus Ola Kleden sebagai konsultan UN-REDD Programme Indonesia. Mereka bertiga mengevaluasi keseluruhan tahapan tersebut melalui kajian dokumen kegiatan serta dialog dengan para pihak terkait, yaitu: Pokja REDD+ Sulawesi Tengah, UN-REDD Programme Indonesia, masyarakat Lembah Mukti, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas-Tinombo.



## Daftar Isi

• Evaluasi Rintisan FPIC .....	1	• Koordinasi Pemangku Kepentingan Multipihak ....	10
• Berbagi Pengalaman pada Konferensi ASFN Ketiga di Siem Reap, Kamboja .....	4	• Sulawesi Tengah Sebagai Provinsi Mitra Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ .....	11
• Lokakarya Tingkat Emisi Referensi .....	6	• Partisipasi Perempuan dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim dan REDD+.....	11
• Pelatihan Penghitungan Tingkat Emisi Referensi .....	7	• Kerja Sama untuk Menyelaraskan Strategi REDD+ Sulawesi Tengah .....	12
• Workshop <i>Multiple Benefit</i> REDD+ .....	8	• Profil Pelatihan Perubahan Iklim dan REDD+.....	12
• <i>Country Need Assessment</i> , Refleksi Prestasi, dan Kebutuhan .....	9	• Lokakarya Allometric Equations .....	13
• Pertemuan Tripartit untuk Kemajuan REDD+ di Sulawesi Tengah .....	10	• Pemuka Agama, Perubahan Iklim, dan Implementasi REDD+.....	14
		• Pembekalan Fasilitator FPIC.....	16

Dialog hasil evaluasi mengkonfirmasi dan melengkapi hasil-hasil evaluasi, memperjelas permasalahan yang ada di lapangan, serta mengidentifikasi perbaikan-perbaikan yang diperlukan, baik untuk rintisan tahap berikutnya maupun untuk penyempurnaan Panduan FPIC. Dengan demikian diharapkan adanya Panduan FPIC yang akomodatif terhadap kondisi dan situasi Sulawesi Tengah, dengan tetap memegang prinsip-prinsip yang terkandung dalam FPIC.

Dari evaluasi rintisan FPIC di Desa Lembah Mukti tersebut diharapkan (1) diperoleh masukan untuk finalisasi panduan FPIC yang lebih operasional, (2)

diperoleh pembelajaran FPIC yang dapat diacu oleh para terkait sektor kehutanan, (3) tersusun rencana kegiatan rintisan FPIC yang akan dilaksanakan di Desa Pakuli dan Simoro, Kabupaten Sigi, yang berada dalam lingkup Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).

Peserta evaluasi FPIC ini terdiri dari anggota Tim Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah, Tim Penyusun Panduan FPIC Sulawesi Tengah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo, Balai Besar TNLL, Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala, Dinas Kehutanan Kabupaten Sigi, BPKH, BPDAS, BK SDA, BP2HP, UNDP, dan undangan lainnya.



Haryanto Putro (Atas)

Emilianus Ola Kleden (Tengah)

Didik Suharjito (Bawah)



Peserta aktif memberi tanggapan atas evaluasi FPIC yang telah dilaksanakan di Sulawesi Tengah.





Suasana diskusi atas evaluasi FPIC di Sulawesi Tengah.



Peserta berfoto bersama sesuai kegiatan evaluasi.



Peserta ASFN ke-3 saat kunjungan lapangan.

## Berbagi Pengalaman pada Konferensi ASFN Ketiga di Siem Reap, Kamboja



Pada konferensi ASFN (ASEAN Social Forestry Network) yang ketiga, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah dan Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah berbagi pengalaman tentang membangun kesiapan (*readiness*) REDD+ dan praktik-praktik kehutanan sosial (*social forestry*) yang berkembang di Sulawesi Tengah.

Acara yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja pada tanggal 11-13 Juni 2012 itu memberi kesempatan kepada para pihak dari Sulawesi Tengah untuk memberikan paparan tentang REDD+ di Sulawesi Tengah. Beberapa peserta menanggapi dengan mengapresiasi pelibatan kelompok agama dan terakomodasi-

ya isu gender dalam proses-proses membangun kesiapan tersebut.

Dari Kamboja, diperoleh hikmah pembelajaran menarik dari aktivitas percontohan (*demonstration activities* atau DA) di Provinsi Oddar Meanchey yang melibatkan para biksu Buddha dalam menyiapkan kawasan DA tersebut. Para biksu ini terlibat aktif



dalam berbagai kegiatan, termasuk pengembangan skema distribusi manfaat (*benefit distribution system*) dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat (*community forestry*). Kegiatan tersebut mencakup 58 desa dengan kawasan hutan seluas 64.318 hektar.

Di sela-sela ASFN juga diselenggarakan *knowledge fair* yang diikuti berbagai peserta, termasuk yang diikuti UN-REDD Programme Indonesia. Dalam kesempatan itu, UN-REDD Programme Indonesia memamerkan dan membagikan berbagai materi komunikasi yang telah dibuat. Alhasil, para pengunjung tertarik dengan hasil yang telah dilakukan UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah, terutama bagaimana para pemangku kepentingan multipihak terlibat dan bersama-sama membangun kesiapan REDD+ di provinsi yang terletak di jantung Pulau Sulawesi itu.



Di Provinsi Oddar Meanchey yang melibatkan para biksu Budha dalam menyiapkan kawasan *demonstration activities* (DA).



Peserta ASFN ke-3 berfoto bersama.



## Lokakarya Tingkat Emisi Referensi untuk Sulawesi Tengah

Penghitungan Reference Emission Level (REL) atau Reference Level (RL) merupakan salah satu bagian dari kegiatan MRV emisi gas rumah kaca.

Angka ini akan menentukan keberhasilan penurunan emisi dengan membandingkan dengan emisi aktual yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu.



metodologi untuk Sulawesi Tengah. Secara khusus, lokakarya yang dihadiri perwakilan Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan, beberapa lembaga swadaya masyarakat, dan beberapa universitas ini bertujuan:

- Melakukan konsultasi atas pendekatan metodologi yang diterapkan di Sulawesi Tengah
- Mengkaji ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan REL di Sulawesi Tengah
- Mengawasi pengembangan REL sementara di provinsi tersebut
- Meningkatkan kerja sama antar universitas, terutama di bagian timur Indonesia, untuk mengembangkan REDD+.

▶ Peserta lokakarya REL dengan serius menyimak metodologi penghitungan REL.

Tingkat emisi referensi atau *reference emissions level* (REL) merupakan salah satu bagian penting untuk dikembangkan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan (*reducing emissions from deforestation and forest degradation plus* atau REDD+). Khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah, UN-REDD Programme Indonesia dengan dukungan Pokja II REDD+ Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah mengembangkan REL melalui berbagai aktivitas. Dengan fasilitasi konsultan nasional UN-REDD Programme Indonesia, diadakan sejumlah aktivitas berupa kajian metodologi, diskusi kelompok terfokus (FGD), maupun lokakarya. Salah satu lokakarya terkait REL dilaksanakan pada 7 Agustus 2012 di Palu.

Lokakarya ini bertujuan menjelaskan pengembangan REL bidang

▶ Narasumber menjelaskan tentang pengembangan REL.



Tingkat emisi referensi (*reference emissions level* atau REL) merupakan jumlah kotor emisi gas rumah kaca pada area geografis tertentu selama periode referensi tertentu yang digunakan untuk menunjukkan penurunan tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Mengingat pentingnya akurasi penghitungan REL untuk implementasi REDD+, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan pemahaman metodologi dan langkah-langkah teknis lainnya oleh para pemangku kepentingan multipihak, khususnya di tingkat subnasional.

Untuk itu, UN-REDD Programme Indonesia menyelenggarakan pelatihan untuk penghitungan REL di Bogor pada 28-31 Mei 2012. Pelatihan yang diadakan berkat kerja sama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kehutanan itu mencakup identifikasi langkah-langkah penghitungan, waktu pengambilan data, dan cara analisa data agar dihasilkan penghitungan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pelatihan selama empat hari itu diikuti perwakilan dari Kementerian

## Pelatihan Penghitungan Tingkat Emisi Referensi dalam Mendukung Penyusunan Rencana Alokasi Daerah Propinsi



Peserta pelatihan Penghitungan REL.

Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian Sulawesi Tengah, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Sulawesi Tengah, Satuan Tugas REDD+ Nasional, serta Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Kegiatan yang difasilitasi oleh fasilitator dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Universitas Tadulako ini dapat

mencapai :

- Pemahaman bersama atas identifikasi REL untuk implementasi REDD+ di tingkat nasional dan subnasional.
- Pemahaman teknis yang lebih baik tentang penghitungan REL dengan metode yang digunakan di tingkat nasional dan subnasional.



## Workshop *Multiple Benefit* REDD+



**R**EDD+ memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang lebih banyak selain mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk dampak positif terhadap keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan dan menguatkan hak-hak masyarakat adat dan/atau lokal. Oleh sebab itu, jika dirancang dengan baik dan benar, REDD+ dapat menghasilkan tiga sisi keuntungan, yaitu dari sisi iklim, keanekaragaman hayati, dan pem-



Peserta Lokakarya menyimak dengan serius penjelasan soal manfaat REDD+ (gambar atas).

Fasilitator lokakarya melayani dengan sabar pertanyaan kritis para peserta (gambar tengah).

Peserta Lokakarya Multiple Benefit REDD+ berfoto bersama sesuai acara (gambar bawah).



bangunan berkelanjutan. Sistem Distribusi Manfaat (*Benefit Distribution System* atau BDS) merupakan sistem pendistribusian manfaat (*benefit*) yang dihasilkan oleh REDD+, yang tidak hanya berupa uang, tapi juga insentif dan dukungan non-moneter seperti peningkatan kapasitas dan akses kepada pasar.

Untuk melihat kemungkinan dan opsi dari sistem distribusi manfaat REDD+ di Sulawesi Tengah, UN-REDD Programme Indonesia, United Nations Development Programme (UNDP), bersama dengan para pemangku kepentingan multipihak REDD+ di Sulawesi Tengah melakukan lokakarya pada 8 Agustus 2012 di Sigi, Sulawesi Tengah. Secara khusus, tujuan dari lokakarya ini adalah menjawab berbagai pertanyaan terkait BDS di Sulawesi Tengah, antara lain:

- Jenis manfaat apa saja yang diharapkan masyarakat Sulawesi Tengah dengan adanya REDD+ ?
- Apa saja opsi-opsi mekanisme pendistribusian manfaat di tingkat provinsi sampai dengan tingkat masyarakat yang akan diterima oleh masyarakat ?
- Apa saja kendala yang mungkin muncul saat pendistribusian manfaat?
- Pembangunan kapasitas apa yang dibutuhkan untuk menyiapkan dan merencanakan Provinsi Sulawesi Tengah terkait pendistribusian manfaat sesuai REDD+ ?



## Country Need Assessment, Refleksi Prestasi, dan Kebutuhan

26-29 Juni 2012 di Santa Marta, Kolombia

Country Need Assessment (CNA) merupakan penilaian atas upaya, kebutuhan, dan pencapaian kegiatan REDD+ di negara-negara yang melaksanakan REDD+. Pertemuan tentang CNA itu merupakan kerja sama antara UN-REDD Global dan The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).

Pertemuan CNA yang lalu diadakan pada tanggal 26-29 Juni 2012 di Santa Marta, Kolombia. Wakil Kementerian Kehutanan yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Dr. Yetti Rusli, Ir. Yuyu Rahayu, MSc., dan dari UN-REDD Programme Indonesia, Ir. Laksmi Banowati, MSc. Pertemuan ini membahas kebutuhan untuk pembangunan REDD+ dan melaporkan tentang kemajuan kegiatan REDD+ yang ada di setiap negara peserta.

Kebutuhan pendanaan suatu negara terkait dengan pelaksanaan REDD+ yang dinilai berdasarkan perkembangan tahapan, dan kemampuannya secara finansial, teknologi, metodologi, serta sumber daya manusia. Bagi Indonesia, laporan CNA dapat dipergunakan sebagai ajang promosi tentang kemajuan Indonesia dalam melaksanakan REDD+ sampai saat ini. Meski demikian, laporan CNA perlu mencerminkan kebutuhan yang tepat agar dapat mengidentifikasi bantuan pendanaan tepat sasaran dan tepat ukuran, sehingga tidak menjadi sia-sia atau bahkan merepotkan.



Lokakarya yang dihadiri sekitar 45 orang dari berbagai pemangku kepentingan seperti unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademik, masyarakat adat dan/atau lokal ini dalam pelaksanaannya dibagi menjadi acara diskusi, curah pendapat (*brain storming*), berbagi pem-

belajaran (*share learning*), permainan peran (*role playing*), dan wawancara informal. Dengan demikian diharapkan, semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah dapat teridentifikasi untuk kemudian diakomodasi oleh pihak pelaksana.

## Pertemuan Tripartit untuk Kemajuan REDD+ di Sulawesi Tengah

Untuk menindaklanjuti surat Satuan Tugas (Satgas) REDD+ ke Gubernur Sulawesi Tengah tentang Sulawesi Tengah sebagai provinsi mitra Satgas REDD+, telah dilakukan pertemuan tiga pihak (*tripartit*) antara Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah selaku focal point UN-REDD Programme Indonesia, Project Management Unit (PMU) UN-REDD Programme Indonesia, dan Satgas REDD+ pada 9 Juni 2012 di Jakarta.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah Bapak Ir. Nahardi, M.M. dan Kepala Bidang Bina Usaha Hasil Hutan Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah Bapak Pepi Saeful Jalal. Semen-

tara itu, Satgas REDD+ diwakili oleh Bapak Mubariq Ahmad, Bapak Azis Khan, Ibu Avi Mahaningtyas, dan Bapak Rachmat Irwansjah. PMU UN-REDD yang diwakili oleh Ibu Laksmi Banowati dan Bapak Agus Hernadi. Pertemuan itu menghasilkan respon positif dari Satgas REDD+ dan hal itu merupakan langkah maju demi keberlanjutan proses-proses kesiapan REDD+ di Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan itu, Bapak Nahardi menyampaikan permasalahan kehutanan di Sulawesi Tengah, termasuk keseriusan serta kesiapan untuk implementasi REDD+. Digarisbawahi juga oleh Bapak Mubariq bahwa Sulawesi Tengah sebagai provinsi mitra

akan difasilitasi oleh Satgas REDD+ dalam menyiapkan strategi dan rencana aksi provinsi (SRAP). Untuk menginisiasi hal tersebut direncanakan akan ada kunjungan Satgas REDD+ ke Sulawesi Tengah untuk bertemu dengan para pihak dan berdialog tentang kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Hal ini terutama karena Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah sedang menyusun Strategi REDD+ di Sulawesi Tengah. Disepakati juga bahwa pendampingan Satgas REDD+ tidak merupakan duplikasi atau tumpang tindih atas kerja-kerja dan capaian-capaian yang sudah diraih Pokja REDD+ Sulteng selama ini.

## Koordinasi Pemangku Kepentingan Multipihak

Sebagai tindak lanjut pertemuan tiga pihak (*tripartit*) antara Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Project Management Unit (PMU) UN-REDD Programme Indonesia, dan Satgas REDD+ pada 9 Juni 2012 di Jakarta, maka Satuan Tugas (Satgas) REDD+ Nasional melakukan kunjungan ke Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 21-22 Juni 2012. Kedatangan Satgas REDD+ disambut hangat oleh para pemangku kepentingan multipihak REDD+ di provinsi itu, antara lain Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah.

Tujuan kunjungan itu adalah mem-bicarakan fasilitasi Satgas REDD+, khususnya untuk penyusunan SRAP (Strategi dan Rencana Aksi Provinsi). Pertemuan ini memperjelas respon dari para pemangku kepentingan multipihak di Sulawesi Tengah atas

Surat Satgas REDD+ mengenai fasilitasi Satgas REDD+ untuk menyusun SRAP dan menentukan rencana ke depan.

Besar harapan dari para pemangku kepentingan bahwa REDD+ dapat diimplementasikan di Sulawesi Tengah. Di samping itu, teridentifikasi

juga adanya kebutuhan akan penyebaran informasi tentang REDD+, terutama di tingkat kabupaten sampai di tingkat tapak/masyarakat. Sebagai langkah berikutnya, akan diadakan lokakarya SRAP di Palu dengan melibatkan para pihak, baik yang ada di dalam maupun di luar Pokja.



Kota Palu

## Sulawesi Tengah Sebagai Provinsi Mitra Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+

Sebagai respon atas surat Gubernur Sulawesi Tengah No. 522/130/DISHUTDA yang ditujukan ke Satuan Tugas (Satgas) REDD+ Nasional tentang Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah, Bapak Kuntoro Mangkusubroto selaku Ketua Satgas REDD+ telah bersurat kepada Gubernur Sulawesi Tengah (No. B-136/REDD II/05/2012 tanggal 16 Mei 2012) tentang dukungan terhadap Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi mitra Satgas REDD+.

Butir utama dari surat tersebut adalah Sulawesi Tengah sebagai provinsi mitra Satgas REDD+ akan menerima dukungan untuk mengembangkan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) sebagai



Longki Djanggola,  
Gubernur Sulawesi Tengah

bagian dari implementasi REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah. Di samping itu, dalam surat itu disebutkan bahwa penyusunan SRAP mengedepankan



Kuntoro Mangkusubroto,  
Ketua Satgas REDD+

pendekatan multipihak, sesuai dengan proses-proses yang selama ini berlangsung dalam kegiatan-kegiatan Pokja REDD+ di Sulawesi Tengah.

## Partisipasi Perempuan dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim dan REDD+

Dalam kehidupan masyarakat di sekitar hutan, peran wanita sangat penting. Pengetahuan para wanita dalam memanfaatkan hasil-hasil hutan, khususnya hasil hutan non-kayu, sangat penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya hasil hutan di tengah upayanya mempertahankan kelangsungan keluarganya. Ketergantungan wanita dalam masyarakat di sekitar hutan terhadap keberadaan hutan sangat tinggi, baik dalam hal ekstraksi hasil hutan nonkayu, dalam mengkonsumsinya maupun dalam perdagangan hasil hutan.

Mengingat kaum wanita ini mempunyai peran penting dalam menjamin kelangsungan keberadaan sumberdaya hutan, meski pada kenyataannya mereka kerap terpinggirkan dalam kebijakan pengelolaan hutan. Sering kali para wanita sering (atau malah tidak pernah) dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan

hutan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan.

Dalam implementasi REDD+, peran wanita diposisikan penting dan menjadi faktor penting dalam kerangka pengaman bagi keberhasilan implementasi REDD+ di Indonesia. Untuk itu, UN-REDD Programme Indonesia menyelenggarakan "Lokakarya Safeguard Gender" di Bora, Sulteng, pada 21-22 Juni 2012.

Tujuan kegiatan ini adalah (1) mendiseminasikan isu perubahan iklim serta REDD+ dan perkembangannya ke para penggiat wanita di Sulteng, (2) mendapatkan masukan dari para peserta workshop terkait dengan isu gender dan REDD+, (3) memperoleh rekomendasi mengenai langkah yang dapat disarankan untuk diambil oleh pihak-pihak terkait untuk kegiatan pengarusutamaan gender untuk menjalankan strategi REDD+ di Sul-

teng, dan (4) memperkuat jaringan komunikasi antar praktisi dan pengelola organisasi wanita di Sulteng, organisasi/pemerhati lingkungan, dalam usaha bersama mendukung kegiatan pelestarian hutan di Sulteng khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Dari lokakarya diharapkan peserta dapat memahami isu perubahan iklim dan REDD+, memberi usulan rekomendasi Kebijakan untuk penyempurnaan strada REDD+ Sulteng, dapat merumuskan strategi kerangka pengaman gender untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi hutan, serta mengetahui proses pelibatan organisasi wanita dalam REDD+.

Pemateri lokakarya adalah Yani Septiyani dan Doddy Sukadri. Sedangkan fasilitator kegiatan adalah Rukmini P. Toheke, Maya Safirah, dan Rizal Mahfud.

## Kerja Sama Penyelarasan Strategi REDD+ Sulawesi Tengah

Sebagai langkah awal fasilitasi Satuan Tugas (Satgas) REDD+ Nasional untuk kelanjutan kegiatan REDD+ di Sulawesi Tengah, diadakan lokakarya penyelarasan hasil-hasil kerja Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi dengan arahan nasional.

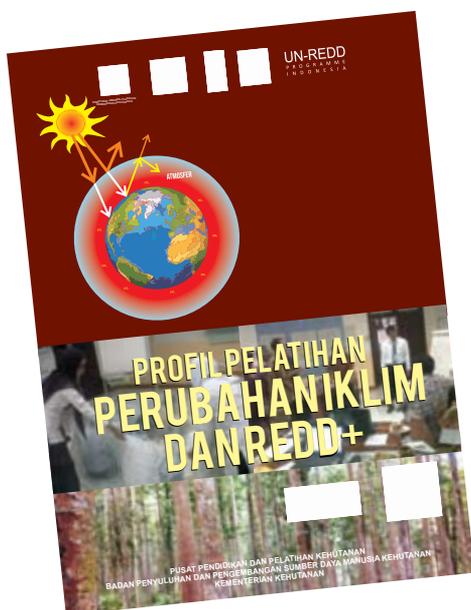
Pada tanggal 10-11 Juli 2012 di Palu, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Satgas REDD+ Nasional, UN-REDD Programme Indonesia, dan Pokja REDD+ Sulawesi Tengah berkumpul untuk menyelaraskan draf final Strategi Nasional REDD+, RAD-GRK, (Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca), maupun SRAP (Strategi dan Rencana Aksi Provinsi). Lokakarya ini juga dihadiri perwakilan dari pemangku kepentingan

lainnya di Sulawesi Tengah, termasuk Pokja Pantau REDD+.

Dalam paparannya, Bappenas menegaskan bahwa penyusunan RAD-GRK sudah ada ketentuannya, yakni Peraturan Presiden No. 61/2011 yang menentukan setiap provinsi harus menyerahkan RAD-GRK selambat-lambatnya bulan September 2012. Salah satu tindak lanjut dari lokakarya ini adalah pengembangan rencana aksi (penurunan emisi) provinsi yang mencakup kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah. Rencana aksi yang terintegrasi dengan Strategi REDD+ akan menjadi elemen utama SRAP. Selain itu, strategi dan rencana aksi ini juga akan menjadi bagian dari RAD-GRK, yaitu untuk sektor kehutanan dan lahan

gambut. Untuk itu, Pokja REDD+ Sulawesi Tengah (khususnya Pokja I yang membawahi bidang kebijakan) akan mengawal proses-proses penuntasan Strategi REDD+, sementara Pokja RAD-GRK dari Bappenas akan mengembangkan rencana aksi sektor kehutanan dan lahan gambut. Pokja REDD+ Sulawesi Tengah khususnya yang membawahi bidang metodologi akan bersinergi dengan Pokja RAD-GRK dalam hal ini. Sebagaimana diketahui, baik Pokja REDD+ Sulawesi Tengah maupun Pokja RAD-GRK dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah, dan diharapkan saling mendukung dalam rangka persiapan serta implementasi upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca di provinsi tersebut.

## Profil Pelatihan Perubahan Iklim dan REDD+



Perubahan iklim dan REDD+ menjadi topik yang banyak dibicarakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, ilmuwan, dunia usaha maupun masyarakat umumnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkepentingan terhadap isu tersebut telah memulai mempersiapkan berbagai kebijakan dan persiapan lainnya guna antisipasi implementasi di masa datang. Kementerian Kehutanan merupakan salah satu sektor yang sangat relevan untuk mengambil peran terkait dengan isu tersebut. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan/pelatihan kehutanan baik untuk aparatur maupun sumber daya manusia lainnya telah memulai dengan berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas terkait perubahan iklim dan REDD+. Untuk itu, langkah yang ditempuh adalah memberi informasi dan mempercepat kegiatan pelatihan, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, Pusat Standardisasi Lingkungan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, serta berbagai mitra kerja Kementerian Kehutanan (UN-REDD Programme Indonesia, RECOFTC) mengidentifikasi berbagai kegiatan pelatihan yang terkait dengan perubahan iklim dan REDD+ tersebut. Hasil identifikasi berbagai kegiatan pelatihan tersebut kemudian disusun dalam bentuk buku berjudul *Profil Pelatihan Perubahan Iklim dan REDD+*. Secara umum pelatihan terkait dengan perubahan iklim dan REDD+ terbagi dua, yaitu yang bersifat umum dan yang teknis. Buku ini berisi Kata Pengantar tentang: nama pelatihan, latar belakang, tujuan pelatihan, *out put*, lama pelatihan peserta dan materi pelatihan. Mengingat kegiatan pelatihan perubahan iklim dan REDD+ ini akan terus berkembang, maka buku ini juga bersifat dinamis dan dapat menjadi *living document*.

## Lokakarya *Allometric Equations* Mengenalkan *Measurement, Reporting, and* *Verification (MRV)* Lebih Akurat

**A**llometric equation (AE) merupakan model untuk menghitung ulang nilai emisi dan serapan karbon gas rumah kaca secara tahunan. AE yang merupakan elemen penting dari sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (*measurement, reporting and verification* atau MRV) REDD+, diperlukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketersediaan data yang tepat untuk menghitung biomassa hutan, serta mengukur perkiraan cadangan karbon dan perubahannya secara akurat.

Model-model penghitungan karbon yang ada di Indonesia pada saat ini tidak mudah untuk diakses oleh publik. Selain itu, sebagian besar AE mendasarkan penelitiannya di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, belum mencapai Indonesia bagian timur

seperti Sulawesi. Tidak semua jenis hutan terwakili dalam penelitian-penelitian tersebut, sehingga tidak ada ketepatan perhitungan biomassa untuk jenis-jenis hutan di wilayah tersebut. Basis data yang mencakup volume dan biomassa yang telah berkembang sangat dibutuhkan sebagai dasar penelitian AE yang baru.

Oleh sebab itu, bekerja sama dengan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan, UN-REDD Programme Indonesia mengadakan lokakarya AE pada tanggal 23 Juli 2012. Lokakarya ini bertujuan memfasilitasi proses pengambilan data AE yang ada di Indonesia, mengidentifikasi kekurangannya, serta menyusun rencana untuk mengatasi kekurangan tersebut.

Sekitar 45 peserta yang sebagian besar adalah peneliti dari berbagai universitas dan pusat penelitian di Indonesia berkumpul di Bogor dan menghasilkan daftar AE yang cukup komprehensif. Selain itu, dihasilkan pula daftar jenis hutan dan wilayah yang belum tercakup dalam AE, serta rencana aksi pengembangan AE untuk Indonesia. Diharapkan langkah ini akan membantu upaya penurunan emisi gas rumah kaca secara merata di seluruh kawasan Indonesia.

Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc. dan Dr. Yeti Rusli dari Kementerian Kehutanan berbagi informasi dengan media di sela-sela lokakarya.



## Pemuka Agama, Perubahan Iklim, dan Implementasi REDD+



Dalam konteks penyiapan REDD+, Pokja dan para pihak yang terkait telah berupaya melakukan jangkauan kepada publik seluas mungkin di Sulawesi Tengah, di antaranya kepada para tokoh atau pemuka agama. Apalagi propinsi ini dengan penduduk yang multiagama. Untuk itu UN-REDD Programme Indonesia bersama Dinas Kehutanan Sulteng dan GP Ansor bekerjasama menyelenggarakan "Pertemuan Interaksi Pemuka Agama di Sulawesi Tengah Terkait dengan Isu Perubahan Iklim dan REDD+" pada 21-22 Juni 2012 di Palu.

Kegiatan ini merupakan upaya untuk memberi ruang bagi para pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha) di Sulteng untuk mendiskusikan REDD+, implementasi penyiapannya, pengayaan kajian tentang fenomena perubahan iklim dengan menggunakan sudut pandang keagamaan, sekaligus diperoleh masukan dan umpan balik

untuk merumuskan metode maupun pendekatan yang efektif dengan membangun interaksi dengan para pemuka agama.

Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini berupa (1) tersosialisasinya informasi yang berhubungan dengan perkembangan inisiatif penyiapan



REDD+ di Sulawesi tengah kepada para tokoh agama; (2) mengetahui pandangan masing-masing agama (melalui tokoh agama) mengenai perubahan iklim yang ditempatkan dalam kerangka teologis, (3) REDD+ menjadi pokok bahasan yang semakin populer dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat

Peserta lokakarya yang dihadiri oleh sekitar 90 orang ini, kemudian membentuk tim inti sebanyak 20 orang untuk memformulasikan hasil proses lokakarya ini ke dalam rumusan deklarasi untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan hutan secara lestari. Hasil rumusan tersebut kemudian ditandatangani oleh perwakilan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, serta Budha. dan diserahkan ke Kepala Dina Kehutanan Sulawesi Tengah.



▲ Para pemuka Sulteng bersiap menandatangani deklarasi.

Para pemuka Sulteng menandatangani deklarasi dan berfoto dengan piagam deklarasi yang telah ditandatangani bersama. ▼



## Pembekalan Fasilitator FPIC Menyongsong Rintisan FPIC di Pakuli dan Simoro, Kabupaten Sigi



Pemberian materi pembekalan fasilitator FPIC.

Setelah pelaksanaan rintisan FPIC di Desa Lembah Mukti, Kabupaten Donggala, pada April 2012 lalu yang dilaksanakan Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah, KPH Dampelas-Tinombo, dan UN-REDD Programme Indonesia dan hasilnya dievaluasi pada 25 Juli 2012 di Bogor, kegiatan rintisan FPIC akan dijalankan awal Oktober 2012 di Desa Pakuli dan Desa Simoro, Kabupaten Sigi, Sulteng.

Pembekalan yang dilaksanakan pada 26 Juli 2012 di Bogor itu diberikan kepada para fasilitator dari Desa Pakuli dan Simoro. Kedua desa tersebut ditandai masyarakatnya sebagai masyarakat adat/lokal yang berhubungan dengan kawasan hutan yang terdapat di Taman Nasional Lore Lindu. Tujuan dari pembekalan

adalah menekankan memberi pemahaman FPIC dan cara penerapannya di lapangan, sehingga peserta mampu mengidentifikasi masalah serta menghormati kearifan lokal yang telah berkembang di masyarakat setempat. Harapannya, implementasi REDD+ di Sulteng mempunyai model FPIC yang mampu mengakomodasi kekhasan dan karakteristik masyarakat Sulteng. Pemateri pembekalan fasilitator ini adalah Didik Suharjito, Haryanto Putro, Emilianus Ola Kledden, dan Kepala Balai Besar TNLL Harjoko.

Meskipun acara berlangsung pada bulan Ramadhan, antusiasme peserta tidak berkurang yang ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan kritis pada sesi tanya jawab.

UN-REDD Programme Indonesia menyambut anggota baru dalam keluarga besarnya. Muhammad Zulficar bergabung sebagai *Team Leader di Bidang Communication and Share Learning Programme* sejak tanggal 2 Juli 2012.

Keluarga Besar  
UN-REDD Programme Indonesia  
turut berduka cita atas kepergian

### Ibu Astathie T.A. Saleh

Sekretaris Dinas Kehutanan Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

Wafat di RS MMC Jakarta,  
pada 24 Juni 2012

dan

### Bapak Hedar Laudjeng

Ketua Kamar Masyarakat  
Dewan Kehutanan Nasional  
dan Tokoh Adat Sulawesi Tengah

yang dipanggil berpulang  
ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa  
setelah mengalami serangan jantung  
pada 7 Juli 2012.

Kami mendoakan beliau berdua  
diterima di sisi-Nya,  
dan keluarga yang ditinggalkan  
diberi kesabaran dalam menghadapi  
kehilangan ini.

Kerja sama antara



UN-REDD  
PROGRAMME  
INDONESIA



#### Redaksi:

Nanda F. Munandar  
M. Zulficar Mochtar

#### Alamat:

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Ruang 525C  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270  
Telepon: +62 21 5795 1050 Faks: +62 21 574 6748

atau silahkan kirim e-mail ke:

info@un-redd.or.id

Untuk Informasi lebih lanjut tentang  
UN-REDD Programme Indonesia kunjungi:  
[www.un-redd.or.id](http://www.un-redd.or.id)